

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

(BUMDes)
**(Di Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata Kabupaten
Gorontalo Utara)**

Oleh :

ROMIS ABAS
NIM: S2116016

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu sosial dan
ilmu politik



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) Di Desa Bulontio Timur Kecamatan
Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

Oleh :

ROMIS ABAS
NIM : S2116016

SKRIPSI

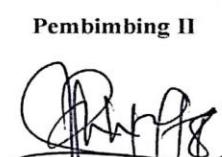
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana
dan telah disetujui oleh tim pembimbing
Gorontalo/..../2020

Pembimbing I



Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924076701

Pembimbing II



Sandi Prahara, S.T.,M.Si
NIDN : 0929038602



Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERSETUJUAN
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes)
(Di Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata
Kabupaten Gorontalo Utara)

Oleh :

ROMIS ABAS
NIM : S2116016

Telah memenuhi syarat dan disetujui oleh tim penguji
Pada tanggal/..../2020

TIM PENGUJI

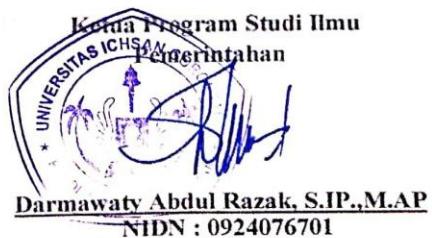
1. Dr. Bala Bakri, S.IP.,S.E.,S.Psi.,MM
2. Ripan Paputungan, S.IP.,M.Si
3. Ahmad Risa M, S.Sos.,M.Si
4. Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
5. Sandi Prahara, S.T.,M.Si

Tanda Tangan



(.....) —
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui :



Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROMIS ABAS
NIM : S2116016
Kosentrasi : Manajemen Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN (BUMDES)**” adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan pengujinya pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia
5. menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo,2020



ROMIS ABAS
NIM : S2116016



Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO

Tujuan pendidikan itu
untuk mempertajam kecerdasan,
memperkuat kemauan
serta memperhalus perasaan.

(Tan Malaka)

Jika emosional akan hadir maka
Kebijaksanaan akan bersembunyi.
(Murthada Muthahhari)

Saya memutuskan bahwa saya akan bertahan
Dengan prinsip-prinsip saya.
Lebih baik di asingkan dari pada
Menyerah terhadap kemunafikan.
(Soe Hok Gie)

ABSTRAK

Romis Abas, S2116016, Peran Pemerintah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Desa Bulontio Timur). Dibimbing oleh Darmawaty Abd. Rajak selaku pembimbing 1 dan Sandi Prahara selaku pembimbing 2.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus di Desa Bulontio Timur), (2) untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dari peran pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus di Desa Bulontio Timur). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif melakukan penelitian dengan cara meneliti langsung kelapangan sehingga akan diperoleh data yang factual, penelitian yang dilakukan dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat serta ilmu pengetahuan yang di dasar kan pada observasi pada kenyataan akal sehat, dan serta hasil tidak spekulatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Bulontio Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus di Desa Bulontio Timur) sangat mendukung dan menfasilitas, memberikan gagasan konsep serta mengendalikan program kerja yang diselenggarakan oleh BUMDes. (2) faktor-faktor penghambat dari peran pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bulontio Timur yaitu pengurus BUMDes desa bulontio timur tida memiliki inisiatif mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah dalam hal penyediaan modal simpan pinjam untuk perkembangan usaha peternakan ayam dan koperasi pertanian dalam hal ini peningkatan kesejahteraan sosial kesejahteraan ekonomi masyarakat desa karena keterbatasan SDM yang di miliki oleh pengelolah sehingga kurangnya modal, infrastruktur, sosialisasi, dan inisiatif masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan (1) bahwa dengan banyaknya anggaran desa yang ada ini maka seharusnya lebih ditegaskan lagi peran pemerintah dalam pengelolaan badan usaha milik desa agar berjalan dengan optimal. (2) tidak lupa juga untuk masyarakat agar lebih berperan aktif untuk bekerja sama dalam pengelolaan badan usaha milik desa agar teroptimal dengan baik.

Keyword (kata kunci) dari hasil penelitian : Peran, Pemerintah, Badan Usaha Milik Desa

ABSTRACT

Romis Abas, S2116016, Government's Role in the Management of Village-Owned Enterprises (Case Study in Bulontio Timur Village). Supervised by DarmawatyAbd.Rajak as supervisor 1 and Sandi Prahara as supervisor 2.

This study aims to (1) identify the role of the Village Government in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) (Case Study in East Bulontio Village), (2) to find out the inhibiting factors of the role of the village government in managing the Village-Owned Enterprises (BUMDES) (Case Study in East Bulontio Village), (2) Bulontio Timur Village). This study uses qualitative research methods, qualitative research conducts research by directly examining the spaciousness so that factual data will be obtained, research conducted with reality that occurs in society and science based on observations on the reality of common sense, and non-speculative results. . This research was conducted in the village of East Bulontio.

The results of this study indicate that (1) The role of the Village Government in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDES) (Case Study in East Bulontio Village) strongly supports and facilitates, provides concept ideas and controls the work programs that are implemented by BUMDes. (2) inhibiting factors of the role of the village government in managing the Village Owned Enterprises (BUMDES) in the East Bulontio Village namely the BUMDes management of the East Bulontio village have no initiative to submit an application to the regional government in terms of providing savings and loan capital for the development of the chicken farm business and Agricultural cooperatives, in this case, increase the economic social welfare of rural communities due to the limited human resources owned by managers, so that there is a lack of capital, infrastructure, socialization, and local community initiatives. Based on the results of the study it is recommended (1) that with the large number of existing village budgets this should further emphasize the role of the government in managing village-owned enterprises to run optimally. (2) do not forget also for the community to be more active in working together in the management of village-owned enterprises to be optimally optimized.

Keywords (keywords) of research results: Role, Government, Village-Owned Enterprises

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah 'azzawajalla, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang sederhana ini yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S.IP) dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya yang masih sangat sederhana. Namun, penulis persembahkan kehadapan para pembaca yang budiman, semoga setelah menelaah isinya berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan Penelitian ini.

Ucapan terimah kasih calon peneliti sampaikan kepada ;

1. Ayahanda Amin Abas yang Tercinta dan Ibunda Erni Nune yang Tersayang
2. Ibu Dr. Hj. Yuriko Abdussamad, M.Si., Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo ;
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si., Sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo ;
4. Bapak Dr. Arman, S.sos., M.Si Sebagai Dekan Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo ;

5. Ibu Darmawaty Abd.Razak, S. Ip.,M.Ap Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo ;
6. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo ;
7. Ibu Darmawaty Abd. Rajak. S.IP,M.AP Pembimbing I
8. Ibu Sandi Prahara ST,M.Si Pembimbing II
9. Sahabat dll.

Semoga bantuan dan dorongan yang calon peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masadepan yang lebih baik. Amin

Gorontalo, 2020

Peneliti

ROMISABAS
NIM : S2116016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat penelitian	4
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Pengertian Peran	5
2.2. Pengertian Pemerintah.....	6
2.3. Pengertian Pengelolaan	8
2.4. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	11
2.4.1. Badan Hukum BUMDes	13
2.4.2. Pengertian Ekonomi	17
2.4.3. Pengertian Desa.....	18
2.4.4. Pengertian Ekonomi Masyarakat Desa	23
BAB III	26
OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	26

3.1. Objek Penelitian	26
3.2. Metode Penelitian.....	26
3.2.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2.2. Lokasi Penelitian.....	26
3.2.3. Fokus Penelitian.....	26
3.3. Jenis dan Sumber Data	27
3.4. Informan Penelitian	28
3.5. Teknik Pengumpulan Data	28
3.6. Teknik Analis Data.....	29
BAB IV	31
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	33
BAB V.....	45
PENUTUP.....	45
5.1. Kesimpulan.....	45
5.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
DAFTAR LAMPIRAN.....	49
RIWAYAT HIDUP.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Nama-nama Kepala Desa Desa Bulontio Timur.	31
Tabel 4. 2 Kondisi Geografis	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	49
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Bersama Informan ..	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Peranan pemerintah desa dalam mengelola Badan usaha milik desa sangatlah penting, sebagaimana tujuan dari dibentuknya badan usaha milik desa dapat menjadi wadah masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan maupun perekonomian masarakat desa. Pemerintah desa sebagai pendorong, penggerak sekaligus sebagai pengawas kegiatan usaha peningkatan perekonomian masyarakat desa, akan tetapi dalam pengelolaan badan usaha milik desa ini semuanya diserahkan kepada masyarakat.

Usaha-usaha yang dikelola oleh masyarakat desa ini bertujuan untuk menggali potensi masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada, sekaligus menggali kreativitas masyarakat dalam menciptakan usaha-usaha yang menambah penghasilan sekaligus dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Badan usaha milik desa ini diharapkan bisa menciptakan masyarakat yang mandiri dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat desa itu sendiri.

Peranan kepala desa dalam hal ini sebagai fungsi pengawasan yaitu dapat mengawasi jalannya usaha milik desa agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menjadi penghambat jalannya usaha milik desa, dengan demikian usaha ini dapat berjalan dengan lancar sehingga bisa mewujudkan hasil yang maksimal yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Demikian pula halnya dengan

menjalankankannya fungsinya sebagai coordinator, kepala desa berkewajiban memberikan pengarahan yang berkaitan dengan proses pengelolaan usaha milik desa.

Undang-undang No. 6 tahun 2014ppasal 1 ayat (2) tentang Desa menjelaskan, Bahw pemerintahdesa adalah“penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan negara kesatuan Republik, sedangkan penyelenggaraannya adalah pemerintah desa, yaitu kepala desa atau atau yang di sebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa. Dimana, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum, tata tertib, tata tertib publik, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keanekaragaman, dan partisipasi”.(*MochSolekhan. 2014:51*).

Pentingnya peranan badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai solusi peningkatan perekonomian rakyat memerlukan adanya konsep pengelolaan yang baik, antara lain ; manajemen yang transparan agar dapat dikontrol oleh masyarakat,hal ini bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang dapat memanfaatkan program usaha ini, dengan demikian program yang direncanakan dapat direalisasikan dengan baik, selanjutnya manajemen yang akuntabel, dengan demikian kepercayaan masyarakat pada pengelolaan usaha milik desa ini bisa diwujudkan, selanjutnya pelibatan masyarakat desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan merupakan hal yang sangat penting, dengan demikian masyarakat akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap

keberhasilan usaha milik desa ini, dan yang terakhir adalah badan usaha milik desa ini bisa memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat desa sebagaimana tujuannya untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tentang peran pemerintah dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dapat ditarik benang merahnya tidak lain tidak bukan sebagai sarana dan prasarana untuk mensejahterakan masyarakat, maka dengan ini penulis ingin meneliti hal-hal yang berkaitan dengan **“Peran Pemerintah Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa”** di Kecamatan Sumalata (Desa Bulontio Timur).

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ?
2. Apa Faktor Penghambat Dari Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Sumalata.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dari Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1.4. Manfaat penelitian

Sebagaimana dipahami bahwa setiap penelitian yang dilakukan memberikan manfaat atau memiliki peran atau orientasi.

1. Untuk Akademisi

Diharapkan akan dapat menambah ilmu pengetahuan teutama menyangkut teori penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pemerintah dan sebagai acuan untuk penyempurnaan pemikiran di masa yang akan datang.

2. Untuk praktisi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan data dan informasi yang actual sebagai masukan dalam upaya perkembangan dan kemajuan pemerintahan desa di Kecamatan Sumalata terutama Desa Bulontio Timur.s

3. Untuk Peneliti

Sebagai bahan referensi ataupun acuan bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya dalam upaya pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik dalam pencapaian kesejhatraan bersama bagi daerah, bangsa dan negara

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Pengertian Peran

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia, “peran adalah sesuatu untuk menjadi bagian dari atau untuk mempertahankan kepemimpinan, terutama dalam hal sesuatu atau peristiwa.”Sementara Soejono (2012: 212) menyatakan bahwa “peran adalah aspek dinamis dari fungsi (status), bagaimana jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, ia akan memenuhi peran, perbedaan antara posisi dan peran adalah dalam pentingnya ilmu “.

Menurut Toha (2012: 10) “peran adalah serangkaian perilaku teratur yang disebabkan oleh posisi tertentu, atau oleh fungsi yang mudah dikenali, kepribadian seseorang juga dapat sangat mempengaruhi bagaimana peran harus dilakukan”. Sementara itu, menurut David Berry (2003: 105), “peran adalah harapan yang dipegang oleh individu yang menempati posisi sosial tertentu, harapan adalah mitra norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran tersebut dapat dikatakan ditentukan oleh norma dalam masyarakat”. Berdasarkan konsep di atas, peran adalah sikap yang ditunjukkan sebagai kewajiban dari pekerjaan yang dilakukannya.

Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), “peran didefinisikan sebagai perilaku yang ditetapkan dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.”Sedangkan menurut Ali (2000: 148), “peran adalah bagian dari mempertahankan kepemimpinan terutama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa”.Sementara itu,

menurut Sisanto (2012: 21), "peran seseorang dapat dikatakan bahwa semakin tinggi posisi seseorang dalam hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah posisi seseorang dalam hierarki organisasi, semakin lebih penting keterampilan teknis yang diperlukan".

2.2.Pengertian Pemerintah

Secara etimologis, pemerintah berasal dari kata command. Menurut Poerwadarmita (2006: 141) mereka adalah sebagai berikut:

1. Perintah adalah kata-kata yang berarti sesuatu.
2. Pemerintah adalah otoritas negarah (regional, negarah) atau badan pengelola tertinggi negara (karena kabinet adalah pemerintah).
3. Pemerintah adalah manajemen atau manajemen, pemerintah dilakukan oleh pemerintah dan institusi terkait yang setara untuk mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, benda, benda, dll.) untuk memerintah. Pemerintahan sebagai representasi negara tentu memiliki tugas dan fungsi sebagai tujuan semula dalam bentuk negara yang lebih halus, lebih baik dalam Muhadam Labolo (2007: 14-16).

Istilah pemerintah menunjukkan setidaknya dua konsep penting, yaitu :

Pertama, pemerintah mengacu pada proses pemerintah, di mana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memiliki yurisdiksi, dalam konteks, semua proses yang terjadi dalam konteks manajemen kekuasaan dilihat sebagai kegiatan yang membentuk bentuk pemerintahan. orang menyadari bahwa semua kegiatan ketertiban dan keterlibatan dalam hal-hal kompleks dalam birokrasi adalah

mekanisme yang sengaja dirancang oleh pemerintah, pada kenyataannya, situasi mengerikan bagi keamanan setiap individu merupakan indikasi ada atau tidak adanya pemerintah. Pemerintah yakin akan ada di sana untuk mencapai tujuan mulianya, yaitu sebagaimana kita menyebutnya dengan menciptakan perdamaian dan keterlibatan sosial (social order).

Kedua, istilah pemerintah mengacu pada keberadaan di mana proses pemerintah berlangsung. Penamaan lembaga pemerintah sering menunjukkan secara langsung di mana pemerintah berada, misalnya di tingkat pusat atau daerah dan regional.

Menurut Samuel Finer (2006: 98), ada pemerintah dan pemerintah dalam arti luas, dengan keberadaan pemerintah dan pemerintah dalam arti luas dan sempit, yaitu:

1. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu tindakan administratif yang dilakukan oleh eksekutif, ya itu Presiden dibantu oleh para menterinya dalam mencapai tujuan Negara.
2. Pemerintah dalam arti kata yang luas, yaitu: tindakan administratif yang dilakukan oleh legislator, eksekutif dan kehakiman untuk mencapai tujuan negara mencapai.

Sementara itu, menurut Safie (2008: 89), berarti bahwa pemerintah dalam arti luas memiliki wewenang untuk menjaga perdamaian dan keamanan negara, oleh karena itu pertama-tama harus memiliki kekuatan militer di dalam atau di luar atau kemampuan untuk mengendalikan militer , kedua, harus memiliki

kekuatan legislatif atau, dalam arti membuat undang-undang, ketiga, ia harus memiliki kedudukan keuangan / kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan masyarakat dalam membiayai biaya hidup. negara dalam implementasi aturan, itu demi kepentingan negara.

Sedangkan menurut Pranadjaja (2003: 24) istilah pemerintah berasal dari kata command, yang berarti kata-kata yang memerintahkan sesuatu. melakukan sesuatu yang perlu dilakukan adalah pemerintah adalah orang, agensi atau perangkat yang memberi atau memberi perintah.

2.3.Pengertian Pengelolaan

Menurut Arikunto (1993: 31) “manajemen dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan manajemen”. Fungsi manajemen Terri dalam Liang Gie (2000: 21) “menyatakan bahwa fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengorganisasian dan pengendalian”.

1. Perencanaan (perencanaan)

Arti banyak rencana dan hal-hal berbeda, menurut pakar manajemen. Menurut Sutomo (2004: 109), “perencanaan adalah penentuan apa yang akan dilakukan atau dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, berkenaan dengan tempat, bagaimana prosedur dicapai, dan siapa pelaku atau pelakunya”.

2. Organizing (Organizing)

Rue and Byars (2006: 6) “menyatakan bahwa Organizing adalah sekelompok kegiatan yang menugaskan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan,

wewenang untuk melaksanakan kegiatannya". Dalam suatu organisasi, tim kerja membutuhkan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan pengorganisasian dan pendistribusian tugas atau pekerjaan di antara anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, diperlukan orang-orang yang memiliki kualitas, kompetensi, dan kompetensi untuk melakukan tugas. Oleh karena itu, perlu untuk menentukan orang tersebut dan memilih siapa yang akan dipercaya atau ditempatkan di posisi tersebut. sehubungan dengan hal tersebut.

3. Arahan (melemahnya)

arahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginan mereka dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kantor secara efektif dan siap untuk kepentingan jangka panjang perusahaan. Ini termasuk memberi tahu orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang berbeda, dari ketat hingga mempertanyakan atau bahkan mengancam.

Tujuannya adalah bahwa tugas-tugas tersebut dapat dilakukan dengan arah yang tepat sehingga manajer mengarahkan, memimpin, dan memengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi melakukan tugas-tugas penting melalui orang lain. Mereka tidak hanya memberikan tugas, tetapi mereka juga menciptakan iklim yang dapat membantu bawahan melakukan yang terbaik. .

4. Pengawasan (Kontroling)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang telah atau telah dilakukan dengan kriteria, norma standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya" dalam (Sutarno NS, 2004: 128).

a. Kontrol atau pengawasan adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen yang dilakukan untuk mencari tahu

1. Apakah semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.
2. Apakah ada hambatan untuk implementasi, pemborosan penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan dan otoritas, dan omong kosong.
3. Untuk mencegah kerugian, perbedaan kewenangan, penyalahgunaan daya, pemadaman listrik dan pemborosan.
4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

b. Tujuan pengawasan adalah:

1. Menghilangkan dan menentukan penyebab yang menyebabkan kesulitan, hambatan sebelum kesulitan dan hambatan terjadi.
2. Melakukan pencegahan dan perbaikan masalah yang muncul.
3. mendapatkan efektivitas dan efisiensi.

Dengan demikian, perencanaan adalah proses pertama dari aktivitas manajemen yang keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan arahan atau ukuran dalam suatu kegiatan, dan kemudian pengorganisasian terkait dengan penyatuan semua sumber daya yang tersedia untuk bekerja sama dalam persiapan untuk implementasi kegiatan. Selanjutnya, manajemen dan implementasi

kegiatan selalu dipandu oleh jadwal yang ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan dan evaluasi, dapat ditingkatkan selama kegiatan atau untuk meningkatkan program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik.

2.4 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan memperkuat dan membentuk keadaan ekonomi desa berdasarkan tingkat kebutuhan dan potensi desa. BUMDES menurut "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk, antara lain, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa). Selain itu, sebagai salah satu lembaga ekonomi pada umumnya, dimaksudkan agar kehadiran dan kinerja BUMDES dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, di samping itu, tidak mengembangkan sistem bisnis kapitalis di daerah pedesaan yang dapat menyebabkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat. BUMDES dibangun sebagai lembaga ekonomi modal bisnis inisiatif masyarakat dan menganut prinsip kemandirian, yang berarti bahwa pemenuhan modal kerja BUMDES harus diperoleh dari masyarakat, tetapi itu tidak menghalangi BUMDES mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, tidak melalui pihak ketiga. "Sebagaimana dinyatakan dalam kami undang-undang (UU 32 tahun 2004 "tentang pemerintah daerah, Pasal 213 (3)). Pembentukan BUMDES dalam undang-undang ini

menekankan bahwa ini sangat penting, karena akan berhubungan dengan peraturan daerah (perda) atau peraturan desa (perdes) ”.

Bagian penting dari merangsang ekonomi pedesaan adalah organisasi ekonomi pedesaan itu sendiri dan bisa menjadi kelemahan dalam rangka dalam mendukung penguatan ekonomi jika implementasinya tidak sejalan dengan tujuan yang dinyatakan. Dalam hal ini, BUMDes sebenarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan institusi ekonomi desa. Berikut adalah beberapa agenda yang dapat diimplementasikan oleh lembaga-lembaga BUMDes:

1. Kemampuan SDM untuk dikembangkan untuk memberikan nilai tambah atau positif bagi aset ekonomi desa,
2. penyesuaian produk ekonomi pedesaan untuk menyediakan Untuk memiliki nilai negosiasi yang baik di lingkungan pasar,
3. ekonomi kompetitif harus direalisasikan dan dikembangkan dalam upaya ekonomi pedesaan.
4. Harus ada penguatan institusi bisnis desa.

BUMDes adalah elemen ekonomi dari suatu lokasi dengan segala macam kemungkinan. Tujuannya adalah untuk menggunakan dan memperkuat potensi desa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi masyarakat desa dengan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa. pengembangan maksimal dan optimal.

2.4.1. Badan Hukum BUMDes

Umumnya, badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah pusat, apakah BUMN atau BUMD dimiliki oleh pemerintah daerah, badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui pernyataan langsung dari jumlah negara atau jumlah pemerintah daerah yang terpisah. Perusahaan milik negara dapat berupa perusahaan besar (perusahaan perusahaan) atau perusahaan umum (Perum). Persero dapat berbentuk PT (perseroan terbatas) di mana modal dibagi menjadi saham setidaknya 51 persen atau sepenuhnya dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah untuk tujuan mengejar keuntungan. Hak lain di Perum adalah BUMN atau BUMD, yang merupakan kebalikan dari BUMN, artinya tidak dibagi menjadi saham karena tujuan berdasarkan prinsip manajemen perusahaan sebagai representasi dari tugas-tugas perusahaan. administrasi publik, meningkatkan manfaat publik sambil mengejar keuntungan.

Dengan demikian, berdasarkan pemikiran yang ditulis di atas, BUMDes adalah entitas bisnis yang mengendalikan sebagian besar atau seluruh modal, atau semua, dalam pemerintahan desa dengan partisipasi langsung atau tidak langsung yang berasal dari sumber daya alam yang terisolasi dari desa. Peraturan Bupati dan Daerah Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang bisnis daerah, disebutkan bahwa peraturan desa merupakan badan hukum yang diperoleh sebagian sebagai hasil dari legalisasi peraturan daerah untuk pembentukan BUMD.

Sumber daya alam desa adalah modal utama BUMDes dalam hal semua sumber daya alam desa, seperti properti bergerak atau tidak bergerak dari

BUMDes, kerja sama dan bantuan dari pihak lain, seperti berbagai bantuan pemerintah. Hubungan dengan pengembangan UPK sebagai bumdes harus dilakukan sebagai pengantar modal UPK sebagai aset desa. Oleh karena itu, pemikiran dapat dikembangkan, yaitu:

Pertama, aset UPK harus dibagi menjadi buku-buku sebagai aset pemerintah desa dan sisanya dialokasikan sebagai saham yang dimiliki oleh masing-masing RTM dengan mekanisme dan atribut tertentu. kemenangan tidak digunakan untuk individu, tetapi untuk dibagikan oleh RTM dalam bentuk skema jaminan sosial. Alternatif kedua relatif konsisten dengan prinsip keadilan dan memberikan jaminan parsial bagi RTM dalam mengembangkan layanan masyarakat UPK sebagai alat pemberdayaan RTM. Namun, perlu untuk menyetujui bagian dan manajemen sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kedua, aset yang dimiliki oleh UPK sepenuhnya ditransfer sebagai aset desa dan terdaftar sebagai modal ibu kota ketika bumdes didirikan. Metode pertama ini tidak memungkinkan RTM untuk memperoleh hak kepemilikan atas aset UPK. Namun, untuk memanfaatkan aset UPK sebaik-baiknya untuk RTM, ini dapat dicapai dengan memasukkan ketentuan bahwa porsi pendapatan bersih yang dihasilkan oleh masyarakat desa (mis. 25%) akan dialokasikan sebagai dana sosial yang dimaksudkan untuk memfasilitasi RTM.

UPK sebagai badan usaha milik desa dengan badan hukum perusahaan desa dibuat berdasarkan peraturan desa berdasarkan peraturan lokal mengenai

pembuatan bom desa. Peraturan desa dalam hal ini ditentukan oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bumdes Permodalan dari:

1. Kekayaan dan aset desa harus dipisahkan. Setiap laporan modal aset desa diambil dari belanja desa (APBDS) dan anggaran yang diterima ditentukan berdasarkan peraturan desa (perdes).
2. Setoran dan dari masyarakat desa.
3. Dukungan modal dari pemerintah kabupaten, provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, itu termasuk beberapa jenis modal UPK yang ditransfer sebagai properti desa.
4. Modal pinjaman modal ventura atau lembaga modal, lembaga keuangan dan lembaga lainnya.

Sedangkan untuk memilih badan hukum atau seperti perseroan terbatas, organisasi lebih fokus mencari keuntungan. Modal perusahaan adalah dalam bentuk saham yang diperdagangkan kepada pihak yang tertarik untuk berinvestasi. Jumlah keuntungan yang direalisasikan oleh masing-masing pihak tergantung pada nilai saham, yang dimiliki oleh PT melalui atau notaris dan Menteri Kehakiman. Pengembangan UPK, dalam bentuk obligasi korporasi, biasanya akan dibatasi oleh tingginya atau jumlah biaya konstruksi atau perabotan yang harus ditanggung. Bagaimana jika Bumdes membentuk perseroan terbatas, maka pemerintah desa berikut adalah:

1. Memiliki pangsa terbesar (setidaknya 51 persen). Untuk dapat mengarahkan visi dan misi BUMDES sesuai dengan kepentingan dan tanggung jawab pemerintah desa.
2. Penyediaan sumber daya melalui penjualan saham kepada individu, lembaga atau kelompok untuk mencapai tujuan (proposal publik), kepemilikan (properti publik) dan kontrol publik (kontrol publik) BUMDES.
3. Pemegang saham pemerintahan desa harus dilembagakan, buku-buku individual.
4. Dewan direksi harus dipilih dari komunitas profesional dan bukan dari aparat desa. Dalam hal ini, manajemen UPK memiliki kualifikasi sebagai dewan direksi yang tidak berasal dari unsur pemerintahan desa. Sementara keterlibatan pemerintahan desa harus dalam posisi dewan pengawas. Dewan direksi memiliki otoritas penuh untuk mengelola bisnis. Sementara dewan pengawas sebagai pemilik perusahaan memiliki wewenang untuk mengadopsi kebijakan strategis dan mengusulkan direktur kepada RUPS.

Perusahaan, CV, UD, dan koperasi tidak cocok sebagai alternatif untuk BUMDES.CV dan lembaga UD, mereka lebih menekankan pada bisnis individu atau keluarga, sehingga mereka tidak cocok dengan BUMDES sebagai perusahaan pemerintah desa yang berfokus pada kepentingan publik. Sementara di desa Gerdu Taskin yang telah mengembangkan desa credit agency (BKD), sesuai dengan Peraturan BI No 6/27 / PBI / 2004 tentang kinerja pengawasan bank kredit desa, dijelaskan bahwa pedoman BKD ditujukan untuk menjadi dari bank kredit

nasional (BPR). Ketentuan ini berimplikasi pada perlunya tidak setiap hari kerja, pelaporan bulanan, pemantauan tingkat kesehatan, dan beban berat sistem akuntansi, organisasi, dan biaya. Oleh karena itu, pertimbangan utama adalah bagaimana UPK dapat terus melayani masyarakat tingkat mikro di daerah pedesaan tanpa dibebani oleh persyaratan kelembagaan yang terkadang sulit dipenuhi.

2.4.2. Pengertian Ekonomi

Ekonomi berasal dari kata Yunani “oikos” yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan “nomos” atau “aturan, aturan, hukum” dan umumnya diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. (N. Gregory Mankiw: 2002: 2). Sedangkan, menurut Albert L Meyer, yang dikutip oleh Winardi dalam bukunya *Introduction to Economics*, ekonomi adalah “ilmu yang mempertanyakan kebutuhan dan kepuasan kebutuhan manusia.

Topik ekonomi secara umum dapat dibagi menjadi ekonomi mikro dan makro ekonomi, dan topik ekonomi juga dapat dibagi menjadi positif (deskriptif) dan normatif, arus utama dan heterodoks dan lainnya. Ekonomi juga berfungsi sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, pemerintah, teori ekonomi juga dapat digunakan di bidang selain bidang moneter seperti penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan lain-lain.

Karena ilmu sosial peduli dengan orang dan apa cara terbaik untuk menyediakan mereka dengan sumber daya material untuk membantu mereka

mewujudkan potensi manusia sepenuhnya. Sejalan dengan tujuan ini, di tengah persaingan global yang lebih kompetitif, banyak pelaku ekonomi terlibat dalam proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa. Salah satu program yang dipromosikan secara intensif oleh Kementerian Dalam Negeri adalah perusahaan desa (BUMDES) sebagai penggerak perekonomian desa.

2.4.3. Pengertian Desa.

Menurut Soekandar Wiriaatmadja dalam bukunya “the point of sociaology rural”. Yang disebut “desa adalah orang hukum adalah orang hukum di mana komunitas swadaya berada”. Desa muncul dari hanya satu tempat tinggal komunitas atau dari desa induk, dan beberapa rumah merupakan bagian dari komunitas hukum terpisah yang membentuk unit perumahan mereka sendiri, yang disebut dukuh, ampean, desa, cantilan, dan pertanian darat, perikanan darat. (Wiriaatmadja, 1986: 12) Menurut Safari Imam Asy'ari dalam bukunya “Urban and Village Sociology” makna desa dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Dari aspek morfologis, desa adalah penggunaan tanah atau tanah oleh penduduk atau komunitas yang bersifat pertanian, serta bangunan tempat tinggal yang berseri.
2. Desa ini dihuni oleh populasi kecil dengan kepadatan rendah.
3. Dari sudut pandang ekonomi, desa adalah daerah di mana penduduknya layak mendapatkan pemeliharaan dasar di bidang pertanian, pertanian atau pertanian, atau nelayan.
4. Dari aspek sosial dan budaya, desa dilihat dari hubungan sosial yang unik antara penghuni, yaitu hubungan keluarga, pribadi, tidak banyak pilihan

dan kehadiran perkotaan yang kurang terlihat, yaitu homogen, dan gotong royong. (Ash'ari, 1993: 94)

Setiap desa juga memiliki balai desa, tempat pertemuan yang ada didesa, dimana tempat pemerintah desa melaksanakan pekerjaan kantornya, dimana diadakan berbagai pertemuan resmi seperti rapat berbagai perhimpunan penduduk. Dalam masyarakat pedesaan hubungan hubungan kekeluargaan sangat kental, dimana orang-orang dapat bergaul dan saling tolong menolong. Rasa persatuannya pertama-tama disebabkan karena kegiatan yang serupa di lapangan pendidikan dan perekonomian. Tanah pertanian dan iklim merupakan dasar alamiah yang utama bagi masyarakat pedesaan. Perbedaan atau variasi antara sifat-sifat unsur tadi di permukaan bumi menyebabkan adanya perbedaan dalam cara bercocok tanam, pengangkutan, alat-alat pertanian dan cara mempergunakannya, serta cara hidup lainnya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka kita mengenal adanya daerah pesawahan, daerah tebu, juga daerah pesisir, daerah pegunungan dan daerah rawa. Sedangkan menurut Rousek dan Warren yang di kutip oleh Jefta Leibo dalam bukunya “Sosiologi Pedesaan” bahwa masyarakat desa mempunyai beberapa karakteristik yang mereka miliki diantaranya, sebagai berikut:

1. Mereka homogen dalam hal (nilai-nilai dalam budaya, mata pencaharian dan perilaku).
2. kehidupan pedesaan terutama berkaitan dengan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Ini berarti bahwa semua anggota keluarga terlibat dalam kegiatan pertanian atau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah

tangga. Dan sangat ditentukan oleh kelompok utama. Yaitu, dalam menyelesaikan masalah, keluarga hanya memainkan peran dalam pengambilan keputusan.

3. Faktor geografis memiliki dampak besar pada kehidupan yang ada (misalnya, hubungan anggota masyarakat dengan negara atau desa kelahiran mereka)
4. Hubungan antara anggota masyarakat lebih intim dan berkelanjutan daripada di kota dan jumlah anak dalam keluarga inti lebih besar / lebih besar. (Leibo, 1994: 7)

Menurut Soekandar Wiriaatmadja dalam bukunya “Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan”, bila jumlah penduduk dijadikan patokan, maka kita pada umumnya dapat menggolongkan bentuk-bentuk masyarakat setempat sebagai berikut:

- a) Kelompok penduduk sampai jumlah 250 orang disebut satu rukun tetangga atau kadang diberi sebutan babakan.
- b) Dari 250 sampai 1000 orang disebut suatu kampung
- c) Dari 1000 sampai 2500 orang disebut sebuah desa
- d) Dari 2500 sampai 5000 orang disebut desa besar
- e) Dari 5000 sampai 10000 orang disebut kota kecil. (Wiriaatmadja,1986:27)

hubungan antara masyarakat pedesaan didirikan sebagai jaringan yang mengontrol semua sendi kehidupan. Ikatan kekerabatan menjadi sumber utama

evaluasi suatu tindakan.Kepemimpinan komunitas berdasarkan keturunan tertua anggota keluarga mewarnai organisasi kehidupan komunitas yang menghormati garis keturunan dan mengatur pandangan masa lalu orang sebagai pelindung atau pola perilaku.Dalam aliansi teritorial atau hubungan dekat, perasaan lampiran ke pangkalan utama daerah.sistem nilai, dihitung sebagai kekuatan yang diberikan dalam membentuk pola perilaku dalam aliansi.

Dalam aliansi sendiri berdasarkan pada prinsip tujuan khusus, seperti di desa-desa di mana penduduk secara fungsional terintegrasi (desa perkebunan, desa nelayan, dll.), Keterampilan khusus tertentu tampaknya mengatur sikap dan sifat kemitraan berdasarkan nilai keahlian atau keterampilan khusus.aliansi hidup berdasarkan prinsip ikatan dari atas, rasa ketergantungan pada atasan dan sikap menghargai atasan.Menurut Soekandar Wiriaatmadja dalam bukunya “Prinsip Sosiologi Pedesaan” Menurut ukuran atau parameter ilmu sosial, desa mengatakan seperti di bawah ini.

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara beberapa ribu jiwa (2000-5000 orang)
2. Ada ikatan perasaan yang samaterhadap kesukaan dan adat kebiasaan.
3. Faktor ekonomi dan faktor kebudayaan ditentukan oleh macamnya pekerjaan. Cara berusaha agraris, yang paling umum didesasangat dipengaruhi oleh lingkungan alam, seperti iklim, kekayaan alam, bencana alam.

4. Watak orang pedesaan berkembang terutama berdasarkan perjuangan melawan kepahitan hidup, seperti saling membantu atau gotong royong (bersihkan desa, saluran air, balai desa) tidak cepat putus asa, tahan uji, perasaan keagamaan yang sangat kuat karena sering berhadapan dengan kekuatan alam. (Wiriaatmadja,1986:132).

Masyarakat pedesaan ada hubungan kekeluargaan yang erat, kental dan lebih mendalam, sistem kehidupannya biasanya berkelompok atas dasarnilai kekeluargaan. Penduduk desa umumnya bermata pencaharian bertani, walaupun ada yang menjadi buruh akan tetapi inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan di samping pertanian hanyalah sambilan saja, bila tiba musim panen pekerjaan sambilan itu ditinggalkan Sedangkan menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo yang di kutip Safari Imam Asy'ari dalam bukunya "Sosiologi Kota dan desa" menerangkan adanya empat kategori warga desa, yaitu:

1. Mereka yang berasal dari turunan orang-orang yang mendirikan desa (cikal bakal). Mereka adalah pemilik tanah-tanah pertanian yang terbaik di pusat desa.
2. Mereka datang kemudian dan membuk atanah yang menjauhkan tempatnya dari pusat desa.
3. Penduduk yang mempunyai tanah di atas pekarangan orang lain, (yakni mereka yang menyewa atau mondok)
4. Orang-orang yang bertempat tinggal menumpang dalam rumah orang lain. (Asy'ari,1993:140).

Menurut Soekandar Wiriaatmadja dalam bukunya “Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan” pergaulan hidup yang akrab di desa sudah banyak berubah waktu sekarang, karena di pengaruhi oleh:

1. Pengaruh modernisasi pertanian (cara bercocok tanam baru, pemupukan anorganik).
2. Perekonomian keuangan yang memberikan nilai-nilai kehidupan secara kebendaan.
3. Terbukanya Desa oleh alat-alat perhubungan yang baik dan baru seperti oleh kereta api, kendaraan bermotor, radio. (Wiriaatmadja, 1986:133)

2.4.4. Pengertian Ekonomi Masyarakat Desa

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga. Desa sebagai suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dan masyarakat menurut Selo Soemaridjan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama dan menciptakan kebudayaan. Maka ekonomi masyarakat desa diartikan sebagai aturan rumah tangga sekelompok orang yang mengadakan pemerintahan sendiri. Ini berarti keadaan kehidupan sekelompok orang di suatu daerah. Kehidupan desa yang masih terkadang jauh dari akses kemajuan, membuat masyarakatnya hanya bisa mengandalkan apa yang berada di wilayah tersebut tanpa memanfaatkan secara maksimal potensi besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Pemenuhan kebutuhan material maupun nonmaterial setiap orangnya tidak merata. Ini bisa terjadi juga karena pengetahuan yang didapat untuk memanfaatkan peluang usaha sangat minim. Sehingga tidak semua orang bisa hidup layak. Adanya kesempatan namun tidak terpenuhi karena tidak dimanfaatkan akhirnya akan terabaikan. Keadaan seperti inilah yang akhirnya membuat masyarakat tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang ia atau keluarganya butuhkan. Masyarakat dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dan mengikuti kemajuan dunia agar bisa menciptakan peluang usaha – usaha yang nantinya akan berdampak bagi orang lain. Namun terdapat kendala lain dalam menciptakan sebuah peluang usaha, selain pengetahuan dan kreatifitas, yang tak kalah penting lainnya adalah permodalan. Seseorang sudah mempunyai pengetahuan yang banyak, proses kreatif yang panjang, namun bila modalnya tidak ada tetap saja tidak bisa berwirausaha.

Maka dari itu adanya BUMDes di sebuah desa menjadi jalan keluar yang efektif. Bila dirasa peminjaman yang ditawarkan oleh Bank berat, BUMDes hadir salah satunya untuk mengantikan peran Bank tersebut. BUMDes menawarkan kredit modal kerja (Pinjaman untuk penambahan modal kerja), kredit konsumtif (kredit Barang atau kebutuhan lain selain modal kerja), penerimaan tabungan dari masyarakat, dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan bisnis yang berpusat pada industri kerakyatan atau pengrajin yang berada dikelompok industri kecil. Penawaran yang seharusnya tidak boleh dilewatkan oleh masyarakat, dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Agar keinginan kedua pihak tercapai, yaitu masyarakat yang sejahtera secara ekonomi mampu

menghidupi kehidupannya dan harapan BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat juga tercapai.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Subjek penelitian Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah Peran pemerintah desa dalam pengelolaan bisnis desa. Penelitian ini akan berlangsung di Kabupaten Gorontalo Utara, Sumalata, Desa bulontio Timur.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode penelitian kualitatif Djam'man Satori (2011: 23) "menunjukkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti menggambarkan fenomena deskriptif non-kuantitatif seperti proses langkah kerja, resep resep, ide konsep yang berbeda, karakteristik barang dan layanan, gambar, gaya, prosedur budaya, model fisik artefak, dll.

3.2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Desa Bulontio Timur.

3.2.3. Fokus Penelitian

1. Peran Pemerintah Desa Dalam mengolah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
2. Faktor penghambat dari Peran Pemerintah Desa dalam mengolah Badan Usaha milik Desa

Menurut Sugiono (2016: 208) “Spradley fokus dalam memperkuat penelitian kualitatif pada fakta bahwa” Referensi khusus ke domain budaya tunggal atau beberapa domain “berarti bahwa fokus adalah domain tunggal yang terkait dengan situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, menentukan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi (lapangan)”.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiono (2014:218) “sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang tidak mementingkan jumlah sampel informan tetapi berkaitan dengan konten,krelevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi yang baik tentang orang”.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari datautama(primer) dan data kedua (sekunder).

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung berupa pengamatan langsung di lapangan dan hasil wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokume seperti laporan penelitian data, letak geografi (wilayah), demografi penduduk, data karakteristik sosial budaya.

3.4. Informan Penelitian

Untuk mencari informasi terhadap penelitian hendaknya di lakukan, maka peneliti mengambil informan dari lingkungan Kecamatan Sumalata Di Desa Bulontio Timur.

1. Kepala desa bulontio timur 1 orang
2. Sekertaris desa bulontio timur 1 orang
3. Pengawas Bumdes desa bulontio timur 1 orang
4. tokoh masarakat desa bulontio timur 3 orang

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari atau menganalisis buku dan bahan tulisan yang dianggap ada hubunganya dengan penelitian.
2. Studi lapangan, yaitu pengumpulaninformasi atau data secara langsung mengunjungi lokasi penelitian yaitu Kantor Desa Bulontio Timur, Desa Bulontio Barat dan Desa Pulahenti di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara melalui:
 - (1) Observasi yaitu pengumpulan informasi atau data secara langsung mengunjungi lokasi penelitian
 - (2) Wawancara yaitu pengumpulan informasi atau data melalui tanya jawab secara langsung terhadap sejumlah narasumber/informan, dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (2016) “data primer dan sekunder yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dari sejumlah hasil wawancara dan observasi”. Ada beberapa aktifitas dalam analisis data diantaranya:

(1) Data Collection (pengumpulan data)

Proses pengumpulan data-data yang nantinya akan menjadi objek penelitian. Langkah ini adalah langkah yang vital dalam penelitian, sebagaimana dalam hakikatnya tujuan dari penelitian itu sendiri adalah mendapatkan suatu data yang menjadi sumber dari penelitian. Hal seperti ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sumber.

(2) Data Reduction (redaksi data)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah diproduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

(3) Data Display (penyajian data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, membuat data bisa mempermudah memahami apa yang terjadi, dalam mendisplaykan data selain

yang berbentuk bentuk teks narativ juga bisa seperti garafik, matrix dan networ.

(4) Conclusion Drawing/Verification

Dalam analisis ini, data verifikasi dan pencabutan awal yang disajikan masih bersifat sementara, dan jika tidak ada bukti kuat yang ditemukan, perubahan akan tercermin pada bagian selanjutnya untuk pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan atau fenomena baru yang sebelumnya tidak ada atau tidak pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa gambar suatu objek yang dalam hal ini masih absurd, tidak jelas atau tidak jelas, sehingga setelah diteliti Temuan, ini mungkin dalam bentuk hubungan sebab akibat interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bulontio Timur terletak di kecamatan Sumalata. Berkut ini adalah data-data desa bulontio timur :

Tabel 4.1 Nama-nama Kepala Desa Desa Bulontio Timur.

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1906-1910	Bulonggodu Dangkua	
2	1910-1916	Bonggudu Laki	
3	1916-1922	Ismail Koem	
4	1922-1926	Yunus Pateda	
5	1926-1931	Tuli	
6	1931-1932	Hurelinggo	
7	1932-1940	Musa Ismail	
8	1940-1946	Nani Ismail Koem	
9	1946-1951	Kango Ismail Koem	
10	1951-1957	Amu Moodutu	
11	1957-1962	Izrak Ismail Koem	
12	1962-1976	Ismail K. Unusa	
13	1976-1979	Abdul K. Unusa	
14	19791993	Haliki Pulu	
15	1993-2003	Kudjiman Raden Sunge	

16	2003-2008	Aswar Unusa	
17	2008-2009	Israminullah Ibrahim	
18	2009-2015	Rizal I. Uwente sampai ekarang	

Sumber data: Profil Desa Bulontio Timur 2015

Desa Bulontio Timur terletak disebelah timur dari Ibu kota kecamatan.

Secara geografis kondisi Desa Bulontio timur seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Kondisi Geografis

NO	URAIAN	Ket.
1	Luas Wilayah : 45.046 Ha	
	Jumlah Dusun : 5 Dusun <ul style="list-style-type: none"> - Dusun Diambu 1 - Dusun Diambu 2 - Dusun Tengah - Dusun Kanto - Dusun Tengah - Dusun Limututu 	
	Batas Wilayah <ul style="list-style-type: none"> - Sebelah Utara : laut Sulawesi - Sebelah Timur : Desa Hutokalo - Sebelah Selatan : Paguyaman - Sebelah Barat : Desa Bulbar 	

	<p>Topografi</p> <p>- Luas Lahan (rata-rata)</p> <p>a. Dataran 225 Ha</p> <p>b. Ketinggian 50-75⁰ dari permukaan laut.</p>	
--	---	--

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut akan dikemukakan hasil wawancara terhadap tiga orang informan yang dianggap mengetahui kondisi dan situasi BUMDes di Desa Bulontio Timur.

Berikut hasil penelitian melalui wawancara dengan informan dan pengamatan secara interpretasi :

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1) Bagaimana peran pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes?

Terkait dengan pertanyaan ini, Kepala Desa Bulontio Timur Mengatakan.

“Dalam hal ini peran pemerintah dalam pengelolaan BUMDes, kami sudah memfasilitasi segala kebutuhan daripada program-program BUMDes yang ada seperti Bangunan Fisik dalam hal ini perkantoran, kandang ayam, dan kebutuhan koperasi pertanian. Hal ini menandakan bahwa adanya keseriusan dari kami sebagai pihak pemerintah Desa Bulontio Timur dalam ikut membantu dan mengembangkan program-program BUMDes yang ada. Akan tetapi dalam hal ini masih banyak

masyarakat yang belum memahami arti penting dari diadakannya BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa itu sendiri”(*Wawancara, 28 Oktober 2019*)

Terkait dengan pertanyaan di atas, penulis juga ikut mewawancarai Sekertaris Desa Bapak Tomi Unusa menyatakan:

“sebagai pemerintah desa tentunya kami menyambut dengan baik segala program yang digagas oleh Badan Usaha Milik Desa.karena, kami sadar betul manfaat yang akan desa rasakan apabila BUMDes ini bisa berjalan dengan baik.nantinya juga yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat.padahal kami berharap BUMDes ini bisa beroperasi kembali untuk mendukung perekonomian desa,serta dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada di Desa.”(hasil wawancara, 29 oktober 2019)

Tak lupa pula penulis mewancarai kepala Dusun Diambu satu,yang penulis kira dapat memberikan inforamsi tambahan terkait dengan pertanyaan di atas.dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 November 2019 beliau menyatakan :

“Saya kira kita sudah mengetahui persis manfaat dari pada BUMDes itu sendiri, saya pribadi sebagai perangkat desa yang ada sangat mendukung penuh segala usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Karena, bagi saya BUMDes apabila bisa dikelolah dengan baik mampu menopong kebutuhan Desa serta

nantinya bias menjadi tulang pungung Desa.akan tetapi, fenomena yang ada BUMDes tidak bias di jalankan dengan baik,itu karena tidak ditopong oleh sumberdaya manusia yang betul – betul paham tugas dan fungsinya.”(hasil wawancara 2 November 2019)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Pemerintah Desa Bulontio Timur, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya keseriusan dari pihak pemerintah Desa dalam membangun BUMDes.tetapi ini di rasa tidak cukup karena belum didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam membangun BUMDes harus ada kerjasama antara pihak pemerintah Desa, lembaga Desa dan masyarakat sehingga apa yang di cita-citakan bersama bisa tercapai serta BUMDes mampu hadir untuk memberi solusi dari setiap permasalahan yang timbul di masyarakat.

Dengan adanya BUMDes,Masyarakat diharapkan mampu madiri dalam mengelolah segala potensi yang ada di dalam Desa.sehingga,masyarakat diberi kebebasan untuk berkreasi serta berinovasi dalam pembangunan desa secara tidak langsung masyarakat sudah ikut mengambil bagian dalam perkembangan di desa Bulontio Timur.

2. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Secara umumBUMDes Desa Bulontio Timur dapat dikatakan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa tempat Pemerintah Desa memberikan kewenangandan memfasilitasi serta memberikan gagasan atau kosep terhadap

BUMDes Desa untuk mengembangkan usahanya berupa Peternakan Ayam dan Koperasi Pertanian untuk mengelolanya. Namun pengurus BUMDes Desa Bulontio Timur tidak memiliki inisiatif mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah dalam hal penyediaan modal simpan pinjam untuk perkembangan usahapeternakan ayam dan koperasi pertanian desa dalam hal ini sebagaimeningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan, karena terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengolah. Tata kelola BUMDes Desa Bulontio Timur tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kurangnya kualitas dan kapasitas pengetahuan dari seorang derator dalam mengelola BUMDes, terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia dan pengetahuan manajemen dalam memahami arti kewirausahaan. Sehingga tata kelola disertai kurangnya menganut prinsip-prinsip pengelolaan dan pengalaman dalam pengelolaan BUMDes yang baik sehingga menyebabkan tidak berkembangnya BUMDes Desa Bulontio Timur.

Terkait dengan hal tersebut, penulis mewawancara ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang penulis kira mengetahui persis kerja – kerja dari Badan usaha Milik Desa. dari hasil wawancara tersebut, ketua BPD mengungkapkan :

“sebagai representasi dari masyarakat desa yang dipilih secara demokratis, tentunya segala yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat menjadi prioritas kami. sejauh ini yang kami lihat, BUMDes tidak mempu menjalankan tugasnya

dengan baik,ini karena tidak adanya kerja sama yang baik antara pihak BUMDes dengan pemerintah desa sehingga sering muncul mis komunikasi antara kedua bela pihak.ini tidak lain dan tidak bukan karena minimnya SDM yang ada.”(hasil Wawancara,03 November 2019)

BUMDesDesa Bulontio Timur belum dapat menjalin hubungan kerja sama dengan pihak mana pun karena BUMDes Desa Bulontio Timur belum dapat mengembangkan usahanya disebabkan kurangnya modal untuk membuat kemajuan usaha sehingga usaha yang dimiliki Desa Bulontio Timur tidak berkembang dengan cepat bahkan sampai saat ini. Tidak lagi beroperasi atau tidak memberikan manfaat pada masyarakat seperti apa yang di harapkan.

Terkait dengan hal tersebut peneliti berusaha mewawancarai ketua BUMDes,berdasarkan hasil wawancara ketua BUMDes menyampaikan:

“BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa yang berada di Desa Bulontio Timur Di dirikan tahun 2013 yang hanya bertahan sampai dengan tahun 2015,sejak didirikan BUMDes desa Bulontio Timur menjalankan 2 jenis usaha yaitu, peternakan ayam dan koperasi pertanian,dengan total angaran awal 50 juta rupiah.akan tapi usaha tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang di rencanakan sejak awal. pertama,kerena kemampuan manejerial serta yang kedua karena kurangnya anggaran yang disediakan. minimnya anggaran yang ada menyebabkan kami kesulitan dalam menjalankan usaha yang

tersebut, sehingga pada akhirnya usaha yang kami rintis bersama tidak mampu bertahan dengan waktu yang lama.”(hasil wawancara 05 november 2019)

BUMDes Desa Bulontio Timur sampai saat ini masih bisa dikatakan vakum atau tidak jalan sebagai mana mestinya, sejak berdirinya pada tahun 2013 hanya bergerak dalam usaha peternakan ayam dan koperasi pertanian namun itupun hanya berlangsung beberapa bulan setelah itu kembali vakum lagi. Badan Usaha Milik Desa Bulontio Timur belum mampu memanfaatkan potensi Desa yang ada untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dengan membuat usaha yang lain seperti menyediakan jasa simpan pinjam dan modal usaha. BUMDes Desa Bulontio Timur belum bisa mengembangkan usahanya dikarenakan minimnya modal yang dimiliki oleh BUMDes.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mencoba mewawancara IK sebagai Tokoh masyarakat yang ada di Desa Bulontio Timur, dari hasil wawancara pada tanggal 08 November 2019 IK mengatakan :

“Sejak di dirikannya BUMDes tersebut saya menyaksikan betul usaha apa saja yang dijalankan, BUMDes yang diharapkan mampu menjawab permasalahan ekonomi desa ternyata masih saja belum dapat menyentuh akar permasalahan yang ada. BUMDes yang ada terkesan tidak mampu berinovasi serta berkreasi dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di desa. Tidak bisa dipungkiri lagi, ini di akibatkan oleh

system manajerial yang kurang matang dalam menjalankan usaha. sehingga usaha yang ada berpotensi bangkrut atau gulung tikar."(hasil wawancara, 08 November 2019)

Emansipasi Badan Usaha Lokal Milik Desa Bulontio Timur terbentuk tidak berdasarkan keinginan seluruh masyarakat desa, sedangkan dalam pembentukan Perusahaan Milik ada hak masyarakat yang harus diperhatikan untuk jenis usaha apa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat desa itu sendiri sehingga emansipasi lokal dengan semangat partisipasi dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat setempat. BUMDes yang lahir dari emansipasi lokal atau pembentukannya melalui musyawarah desa akan memiliki hubungan yang baik antara masyarakat, pemerintah dan manajemen Badan Usaha Milik Desa Bulontio Timur dapat berjalan secara optimal dalam meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat Desa.

Berhubungan dengan hal di atas, penulis mewawancarai SU selaku masyarakat desa Bulontio Timur, dari hasil wawancara pada 12 November SU menyampaikan:

"selaku masyarakat desa Bulontio Timur, saya menilai proses kerja dari BUMDes itu tidak berjalan dengan maksimal sesuai dengan harapan dan cita – cita masyarakat desa. kalau di lihat, ini karena tidak ada kerja sama yang baik antara pemerintah desa selaku penyelenggarah roda pemerintahan yang ada di

desa, dengan pihak pengelolah BUMDes, serta masyarakat sehingga harmonisasi tidak terwujud dengan baik. Jadi, jangan di Tanya lagi kenapa BUMDes tidak bisa bertahan lama,kuncinya adalah minimnya komunikasi yang baik antara ketiga pihak tersebut,”(hasil wawancara, 12 November 2019)

Tradisi desa mampu memiliki kekuasaan dan pemerintahan, yang mengandung otoritas (otoritas) , akuntabilitas untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat Desa. Ketika mandat rakyat diselaraskan dengan otoritas maupun akuntabilitas, kepercayaan akan semakin kuat. Sehingga pemerintah desa mampu menjalankan fungsi perlindungan dan distribusi layanan dasar kepada masyarakat.

Di desa Bulontio Timur, tradisi desa saat ini dapat dikatakan tidak lagi menjadi tradisi desa, yang dapat dilihat di desa Bulontio Timur tidak ada lagi prinsip kerja sama, kerja sama, dan kekeluargaan yang terjadi di desa Bulontio Timur. Tradisi kehidupan desa di Desa Bulontio Timur menghilang karena setiap pembangunan yang dilakukan di Desa Bulontio Timur menjadi proyek untuk mengambil keuntungan dari para pemangku kepentingan di Desa Bulontio Timur. Tidak adanya tradisi desa di Desa Bulontio Timur membuat sulit untuk memajukan BUMDes Desa Bulontio Timur. Tradisi desa adalah hal yang dapat membuat Usaha Milik Desa berkembang dengan baik. Karena dalam tradisi desa, penduduk desa mempercayai kepemimpinan Kepala Desa dan perangkat Desa serta BUMDes yang cukup tinggi. Kontrol masyarakat atas administrasi

Pemerintah, pembangunan dan masyarakat juga cukup kuat, sehingga kepala desa dan aparatur desa dan Manajer Bisnis Milik Desa lainnya menegakkan mandat. Supra Dukungan Desa Bulontio Timur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa harus mendorong pengembangan BUMDes dengan memberikan hibah dan akses ke modal, melakukan bantuan teknis dan pemasaran, serta memprioritaskan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bulontio Timur yang bisa dibilang belum mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Dimana bantuan maksimal yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada BUMDesDesa Bulontio Timur dalam hal proses pemberian bantuan keuangan dilakukan dengan menabung pinjaman modal sehingga membuat Badan Usaha Milik Bulontio Timur sulit untuk berkembang karena kurangnya modal dimiliki oleh BUMDes.

Dalam hal ini yang menjadi faktor penghambat yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan BUMDes Desa Bulontio Timur yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya Infrastruktur BUMDes

Beberapa infrastruktur masih sangat dibutuhkan untuk pengembangan bumdes.Infrastruktur yang di butuhkan berupa jalan menuju lokasi peternakan yang kurang strategis sehingga menghambat akses pengunjung.

2. Kapasitas Manajerial Pengelola

Pengelola BUMDES membutuhkan penambahan kapasitas manajerial, terutama bidang pemasaran.Penjualan yang di lakukan masih sederhana yaitu hanya melalui pasar lokar.Hal ini sangat penting terkait dengan besarnya nilai aset, omset dan juga akuntabilitas.Pengelola juga memerlukan penguatan di

bidang pengelolaan SDM, kewirausahaan dan juga pemasaran. Kemampuan manajemen strategi juga di butuhkan dalam pengelolaan BUMDES.

3. Sosialisasi

Sebagian besar warga tidak mengetahui keberadaan BUMDES karena kurangnya sosialisasi atau komunikasi antara masyarakat dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sehingga mereka tidak memahami secara detail tujuan, fungsi dan keuntungan dari BUMDES tersebut. Warga tidak paham tentang pengelolaan, aset, hasil dan kegiatan dari BUMDES dikarenakan tidak ada informasi dari pemerintahan itu sendiri sehingga BUMDES tersebut tidak berkembang.

4. Sumber Daya Manusia SDM

Manajer BUMDES yang merupakan peserta dalam penelitian ini mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari BUMDES. Dibutuhkan sosialisasi, pelatihan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menumbuhkan semangat kewirausahaan.

3. Apa faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes?

Terkait dengan pertranyaan diatas, informan Ici Angio mengatakan bahwa:

“kalau untuk usaha ayam pedaging yang menjadi penghambatnya pertama, karena faktor pasar dalam artian kalau di desa sini masyarakatnya lebih suka makan daging ayam kampung di bandingkan ayam pedaging, ayam pedaging itu kebutuhannya misalnya ketika perayaan pesta nikahan maupun kedukaan jadi konsumsi untuk ayam

pedaging itu belum terlalu tinggi. Sedangkan yang *kedua* adalah metode pengelolaan BUMDes karena tidak ditopong oleh kualitas Sumberdaya Manusia yang berkualitas sehingga tidak mampu membaca serta menganalisa pasar” (*Hasil wawancara 28 oktober 2019*)

Informan Mohamad Rizal Wente juga mengatakan bahwa:

“ Usaha BUMDes berjalan tidak sesuai dengan apa yang di rencanakan pertama yaitu terkait dengan peternakan ayam pedaging tidak berjalan dengan baik. Karena pengurus BUMDes kurang serius mengurus BUMDes begitupun dengan usaha kedua yaitu koperasi pertanian sampai dengan sekarang sudah tidak lagi beroperasi, sama halnya dengan usaha simpang pinjam. ini di pengaruhi oleh faktor sumberdaya manusia Yang kurang paham dalam menjalankan BUMDes, selain itu juga tidak adanya pelatihan terlebih dahulu bagi pengurus BUMDes” (*hasil wawancara 28 oktober 2019*)

Kemudian informan Yusri Dadu juga menjelaskan bahwa:

“yang saya lihat sejak berdirinya BUMDes pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 artinya ada sekitaran 2 tahun beroperasi di Desa Bulontio Timur penerapannya belum sesuai dengan harapan masyarakat ini disebabkan karena pengelolah BUMDes itu sendiri tidak mampu membaca permintaan pasar, sehingga jangan salahkan jika BUMDes itu sendiri tidak mampu bertahan sampai dengan sekarang. pada intinya

factor yang memicu adalah kualitas SDM yang belum mempuni”(*hasil wawancara 28 oktober 2019*)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa factor yang memicu sampai BUMDes di Desa Bulontio Timur tidak berjalan dengan baik sebagai motor penggerak ekonomi di desa antara lain, karena disebabkan oleh kurangnya kemampuan dari petugas BUMDes dalam membaca permintaan masyarakat seperti simpan pinjam dari BUMDes itu sendiri di karenakan kualitas SDM belum mempuni. Serta, tidak terdapat kerja sama yang baik antara pihak BUMDes dengan pemerintah desa dalam rangka memberikan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya mengenai peran pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes dan Faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDesdiDesaBulontio Timur dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pemerintah desa bulontio timur mendukung dengan memfasilitas, memberikan gagasan / kosep-konsep serta dalam mengendalikan program kerja yang di selenggarakan BUMDes terutama peternakan ayam, dan koperasi pertanian dalam melakukan kerjasama membentuk pengurus pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bulontio timur.

Namun pengurus BUMDes Desa Bulontio Timur tidak memiliki insiatif mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah dalam hal penyediaan modal simpan pinjam untuk perkembangan usaha peternakan Ayam dan Koperasi Pertanian desa dalam hal ini sebagai peningkatan kesejateraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masarakat Desa, karena keterbatasan kapasitas SDM yang di miliki oleh pengelolah. Tata kelolah Badan Usaha Milik Desa di desa Bulontio Timur tidak berjalan sebagai mana mestinya di sebabkan kurangnya kapasitas, kualitas serta pengetahuan yang dimiliki oleh seorang dertor dalam mengelola perusahaan milik desa, terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia dan pengetahuan manajemen dalam memahami arti kewirausahaan.

- Sehingga tata kelolah disertai kurangnya pengalaman dan prinsip-prinsip pengelolaan dalam mengelola yang baik sehingga menyebabkan tidak berkembangnya BUMDesbulontio timur.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan di atas, agar partisipasi masarakat terhadap program BUMdes dapat menghidupkanya lagi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak BUMDes desa bulontio timur sebaiknya dapat menciptakan lapangan kerja untuk masarakat bulontio timur.
2. BUMDes desa bulontio timur sebaiknya mengadakan kegiatan sosialisasi tentang BUMDes secara umum kepada masarakat desa bulontio timur agar masarakat dapat paham banyaknya keuntungan yang akan di dapat dari pasrtisipasi terhadap program BUMDes bulontio timur
3. Pemerintah desa bulontio timur seharusnya turut berperan aktif meningkatkan partisipasi masarakat desa terhadap program BUMDes di desa bulontio timur.
4. Masarakat desa bulontio timur diharapkan kesadaran dalam berpartisipasi demi peningkatan program BUMDes demi kesejatraan bersama.

DAFTARPUSTAKA

- Ali, Muhammad. 2000. Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. Bandung: Angkasa.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Perseda.
- Berry David. 2003. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Finer, Samuel Edward. 2006. Comparative Government terjemahan. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Gie, Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Moderen*. Yogyakarta.Liberti.
- Jefta, Leibo. 1994. *Sosiologi Pedesaan Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Berparadigma Ganda*. Yogyakarta: Andi Offset
- Labolo, Muhamad. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan (Satu Kajian, Teori, Konsep, dan Pemngembangannya). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarmita, W.J.S. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pranadjaja. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Rue dan Byars. 2006. Human Resource Management. 8 edition. McGraw-Hill, Irwin.

- Rivai Veitzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda
- Solekhan Moch. 2014. Penyelenggaraan pemerintah desa. Malang: Setara press.
- Soejono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali press.
- Siswanto. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafie, Inu Kencana. 2008. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditam
- Sutarno NS. 2004. Manajemen Perpustakaan. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Safari Asy'ari Imam.2001. *Sosiologi Kota dan desa*. Bandung: Pt Aksara.
- Satori, Djam'man. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono.2013. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Toha, Miftah. 2012. Birokrasi Kepemimpinan dan Kekuasaan Di Indonesia. Jakarta: Media Widya Mandala.
- Wiriatmadja, S. 1986. Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian. Jakarta: Yasaguna.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Jabatan :

PERTANYAAN :

1. BUMDes itu didirikan pada tahun berapa?

2. Apa saja yang di kelolah oleh BUMDes?

3. Apakah BUMDes ini masih jalan atau tidak?

4. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes?

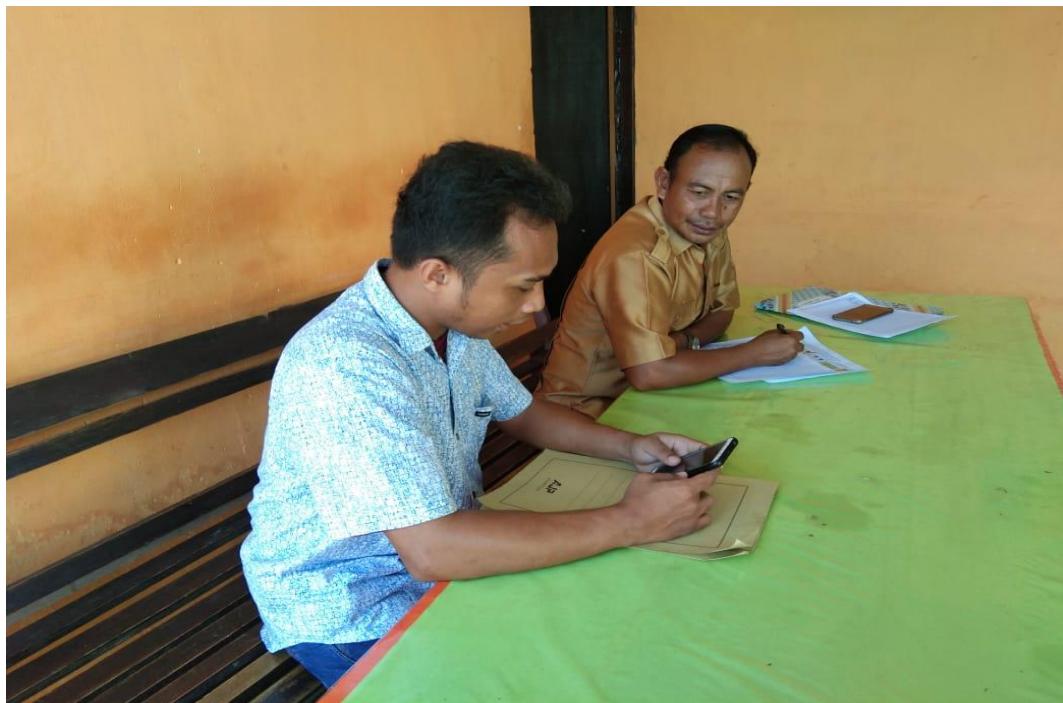
5. Bagaimana peran perintah desa dalam pengelolaan BUMDes?



Wawancara bersama Kepala Desa



Wawancara bersama Ketua BPD



Wawancara bersama Sekretaris Desa



Bersama Aparat Desa



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 1703/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Bulontio Timur

di,-

Desa Bulontio Timur

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Romis Abas

NIM : S2116016

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : DESA BULONTIO TIMUR

Judul Penelitian : PERAN PEMERINTAH DALAM
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA

Atas kebijakan dan kerja samanya
diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 23 Oktober 2019



+



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN SUMALATA
DESA BULONTIO TIMUR

Alamat : Jln. Buol-Gorontalo Desa Bulontio Timur Kode Pos. 96254

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 140 /D-BT/ 191 /III /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RIZAL I. UWENTE**
 Jabatan : Kepala Desa
 Alamat : Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : **ROMIS ABAS**
 NIM : S 2116016
 Program Study : Ilmu Pemerintahan
 Sekolah/Unit : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Bahwa yang bersangkutan benar –benar telah melaksanakan penelitian di Desa Bulontio Timur dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN BUMDES**” di Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara” dari tanggal 28 oktober 2019 s/d 10 November 2019

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Bulontio Timur, 23 Maret 2020

KepalaDesa



RIZAL I. UWENTE



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0025/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN	:	0906058301
Unit Kerja	:	Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	ROMIS ABAS
NIM	:	S2116016
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas	:	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi	:	Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Studi Kasus Di Desa Bulontio Timur, Desa Bulontio Barat, Dan Desa Pulahenti Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

SKRIPSI_Romis Abas_S2116016_Peran Pemerintah Desa
Dalam Pengelolaan BUMDes 2020

ORIGINALITY REPORT

30%	30%	5%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	text-id.123dok.com Internet Source	6%
2	media.neliti.com Internet Source	3%
3	repository.unpas.ac.id Internet Source	3%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
5	repository.unikom.ac.id Internet Source	1 %
6	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
8	gerdutaskin.wordpress.com Internet Source	1 %
9	core.ac.uk	

	Internet Source	
10	octaalfa.wordpress.com Internet Source	1 %
11	uletmoe.blogspot.com Internet Source	1 %
12	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1 %
14	zinyo-amaral.blogspot.com Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
16	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
18	gemelneserblog.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
20	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
21	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
22	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
24	fr.scribd.com Internet Source	<1 %

RIWAYAT HIDUP

Nama : ROMIS ABAS 
 NIM : S2116016
 Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Tempat Tanggal Lahir : BUL-TIM, 11 AGUSTUS 1996

Nama Orang Tua

- Ayah : AMIN ABAS
 - Ibu : ERNI NUNE

Saudara

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET.
1.	2005-2010	SDN1BulontioTimur	Sumalata	Berijasah
2.	2011-2013	SMPN 1 Sumalata	Sumalata	Berijasah
3.	2014-2016	SMAN 2 Gorontalo Utara	Sumalata	Berijasah
4.	2016- S/D Sekarang	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	-